

PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS QURANI DAN KEARIFAN LOKAL

Muhammad Yusuf

UIN Alauddin DPK STAI Al-Furqan Makassar
Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 15 Daya Makassar
e-mail: m.yus56@yahoo.com

Abstrak:

Pendidikan nasional dinilai gagal membentuk karakter dan integritas yang baik. Para sarjana yang mengemban amanah publik telah banyak yang kehilangan kepercayaan akibat korupsi dan manipulasi. Pendidikan sejatinya mampu membentuk karakter melalui penanaman nilai-nilai agama dan kearifan lokal. *Pertama*, pengawasan melekat dengan pendekatan agama yaitu pemberdayaan nilai-nilai agama dalam rangka pencegahan dini terhadap korupsi dan manipulasi. *Kedua*, pemberdayaan nilai-nilai kearifan lokal, dalam konteks inibudaya Bugis yang relevan dengan ajaran Islam. Kearifan budaya dan ajaran Islam mengajarkan kebenaran universal berupa kejujuran dan integritas serta nilai-nilai kebenaran dan kebaikan lainnya. Pendidikan karakter melalui internalisasi nilai-nilai utama pada keseluruhan aktivitas pendidikan, meliputi perencanaan, proses, dan evaluasi. Integrasi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik pada seluruh proses pendidikan dapat membentuk kecerdasan majemuk. Integrasi nilai-nilai universal agama dan keluhuran nilai-nilai budaya bertujuan untuk melahirkan pemimpin yang “berkarakter” dan masyarakat yang damai.

Abstract:

National education was considered fail to build the good character and integrity. The scholars who have responsibility had lost their trust because of corruption and manipulation. Education essentially can build the character through giving moral value and norm. The first is monitoring through religious approach, developing moral value in avoiding corruption and manipulation early. The second is developing norm, for instance, Bugis culture is relevant to Islamic moral. Norm and moral teach the truth such as honesty and integrity including the other goodness. Character building through internalizing value on the whole education activity includes planning, process, and evaluation. Integrating cognitive, affective, and psychomotor on the whole process of education can create multiple intelligence. Integration of moral value and culture is supposed to create a good leader and society.

Kata-kata Kunci:

Pendidikan, agama, nilai, kearifan lokal, karakter.

Pendahuluan

Permasalahan pendidikan hari ini bukan semata-mata rendahnya kualitas pada ranah kognitif-intelektual, tetapi juga pada ranah afektif dan psikomotorik. Sistem Pendidikan Nasional belum mampu membangun pendidikan yang berdaya saing tinggi menghadapi persaingan global. Belum berbicara pada *level internasional*, di Asia Fasifik saja, peringkat kualitas pendidikan Indonesia masih sangat jauh tertinggal, di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Padahal, sebelumnya, Malaysia belajar ke Indonesia dan mengambil guru dari Indonesia. Pada konteks perguruan tinggi, secara umum Indonesia masih sangat tertinggal dibanding Malaysia, terutama dari segi sistem pendidikan, fasilitas, dan publikasi ilmiah bereputasi.

Selain masalah kualitas dari aspek kognitif-intelektual, masalah yang paling krusial adalah rendahnya kualitas akhlak dan karakter yang dimiliki luaran lembaga pendidikan. Meskipun dalam skala kecil Indonesia seringkali menampilkan hasil pendidikan yang amat membanggakan, tetapi hal itu tidak cukup merepresentasikan kualitas pendidikan di Indonesia secara umum. Fakta menunjukkan bahwa kualitas pendidikan itu tercermin pada prilaku *elite* bangsa dan politisi yang seringkali menampilkan perbuatan tidak terpuji. Rendahnya moral dan integritas para birokrat dan aparatur negara, telah mengakibatkan Indonesia carut-marut dan mengalami krisis multi dimensi. Secara riil, para pejabat yang *nota bene* berasal dari lembaga pendidikan, justru menampilkan penyelenggaraan negara yang korup. Hal

itu menunjukkan rendahnya integritas aparatur dan lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan ilustrasi mengenai fakta-fakta potret buram prilaku aparatur negara, masalah utamanya adalah kaum *elite* yang sejatinya menjadi panutan, justru mereka melakukan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Itu berarti, sistem pendidikan di Indonesia telah gagal mempersiapkan kader-kader pemimpin yang memiliki integritas yang baik. Pendidikan di Indonesia tidak mampu menginternalisasi nilai-nilai utama ke dalam proses pendidikan. Sistem Ujian Nasional yang diharapkan menjadi tolok ukur menentukan kualitas hasil proses pendidikan, justru seringkali menampilkan berbagai kekurangan. Pendidikan agama (termasuk pendidikan Islam)¹ yang berbasis nilai tidak berjalan secara efektif, bahkan mengalami disfungsi. Fakta itu telah menjadi kegelisahan banyak kalangan.² Dalam keadaan begitu, beberapa kalangan mencoba menawarkan solusi perlunya mengembalikan pendidikan pada nilai-nilai berbasis agama dan kearifan budaya.

Pendidikan Karakter Perspektif Al-Qur'an

¹ Wahyu Pramudya, "Pluralitas Agama: Tantangan Baru bagi Pendidikan Keagamaan di Indonesia, *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2005, hlm. 282.

² Bandingkan Azhar Arsyad, "Universitas Islam: Integrasi dan Interkoneksi Sains dan Ilmu Agama Menuju Peradaban Islam Universal" *Jurnal Tsaqafah, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Islam*, Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Pondok Modern Darussalam Gontor, Indonesia, Vol. 2. No. 2, 2006, hlm. 427.

Pendidikan dalam perspektif al-Qur'an adalah pendidikan yang menfokuskan diri pada pembinaan manusia secara utuh, sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah. Jika hal ini bisa mengejawantah dalam kenyataan maka umat Islam akan mampu mengimplementasikan ajaran Islam secara komprehensif.³ Seolah nilai-nilai luhur yang bersumber dari ajaran Islam dan budaya mengalami disfungsi dan tidak berdaya berhadapan dengan modernitas serta aneka tantangan yang menyertainya.

Persoalan dan tantangan modernitas tidak lahir dengan sendirinya. Modernitas merupakan anak kandung yang lahir dari rahim kreativitas akal budi manusia yang berkembang sesuai dengan tantangan kehidupan manusia.⁴ Seiring perkembangan ada, tantangan dan permasalahan juga muncul dengan aneka bentuk. Salah satu persoalan yang sangat krusial adalah hasil pendidikan Nasional yang mengecewakan, sebab prilaku pemimpin di Republik ini tidak mencerminkan prilaku terpuji. Nilai-nilai kejujuran tidak tertanam dalam kesadaran mereka. Hal tersebut terbukti pada ketidakmampuan mereka mengimplementasikan kejujuran itu dalam menerima amanah publik, sehingga terjadi prilaku korup.

Nilai-nilai luhur ajaran agama dan nilai-nilai utama suatu budaya hampir tidak berdaya, bahkan mengalami dis-

³ Muhammad Sayyid Sultan, *Buhûts fi al-Tarbiyyah fi al-Tarbiyyah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1979), hlm. 53.

⁴Bandingkan dengan Amin Abdullah "Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas" *Jurnal Pendidikan* (Makassar: Lentera Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin, 1998), hlm. 3.

fungsi menghadapi goa dan materi. Keduanya kadang-kadang tidak mampu menjadi instrumen proteksi terhadap individu aparatur negara dari berbagai tindak pidana korupsi. Padahal, salah satu agenda reformasi, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih termasuk bersih dari praktik korupsi. Dari mana sesungguhnya perubahan dan perbaikan itu dimulai?

Perubahan, perbaikan (reformasi), itu diisyaratkan oleh Al-Qur'an dengan berbagai ayat, di antaranya, yaitu Q.S. al-Ra'd [13]: 11. Ayat ini mengandung informasi yang amat mendasar. *Pertama*, pendidikan karakter bermula dari "sisi dalam" pada manusia (peserta didik) sebagai makna yang diisyaratkan kata 'نفسهم'. *Kedua*, pendidikan karakter harus didukung oleh sebuah sistem yang melibatkan banyak elemen, bukan individu sebagaimana diisyaratkan oleh bentuk jamak/plural 'نفسهم'⁵ yang digunakan pada ayat di atas.

Terma 'نفسهم'(diri mereka sendiri) pada ayat tersebut menunjukkan sisi dalam manusia yang meliputi ide-ide/nilai-nilai yang terdapat dalam benaknya, serta diyakini kebenaran dan manfaatnya yang melahirkan tekad yang kuat untuk merealisasikannya. Dalam merealisasikan pendidikan karakter, Al-Qur'an menempuh prinsip dasar yang dikemukakan oleh Q.S. al-Ra'd [13]: 11 di atas. Petunjuk Al-Qur'an, untuk memulai perubahan dengan pendidikan nilai serta pembentukan karakter yang kemudian pada gilirannya membentuk karakter dan prilaku yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Al-Qur'an surah al-

⁵ M. Quraish Shihab, "Pendidikan Nilai untuk Pembentukan Sikap dan Prilaku", dalam *Jurnal Pendidikan*(Ujung Pandang: Lentera Fak. Tarbiyah IAIN Alauddin 1997), hlm. 32.

Tahrîm/66: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْمٌ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ...".

Pendidikan akan menjadi efektif apabila melalui keteladanan yang dimulai pada diri pendidik, kemudian orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab sebagaimana isyarat kalimat... "pelihara dirimu dan keluargamu". Konsep pembentukan karakter ini merupakan nilai-nilai inti (*core values*) yang mesti ada dalam reformasi pendidikan. Tampaknya hal ini yang terabaikan dari Sistem Pendidikan Nasional, sehingga yang terjadi adalah pemisahan kecerdasan, akibatnya hanya melahirkan generasi yang tidak jujur dan korup. Pendidikan agama juga kadang-kadang penekanannya hanya sekadar penguasaan materi, melupakan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai (afeksi)nya.

Pembinaan karakter melalui pendidikan harus menyentuh aspek kesadaran nurani setiap peserta didik. Perbaikan karakter individu peserta didik dengan memasukkan nilai-nilai luhur yang bersumber dari ajaran agama dan budaya harus menyentuh kesadaran nurani. 'Sisi dalam' yang dimaksud pada terma dua ayat tersebut meliputi paradigma, persepsi, kesadaran, dan ide. Jadi, pembinaan karakter harus mampu menyentuh 'sisi dalam' pada manusia. Perubahan sistem dan Undang-Undang atau peraturan dan kebijakan saja itu tidak cukup, karena manusialah yang menentukan, *the man behind the gun*.

Berdasar pandangan tersebut, pendekatan kemanusiaan (*human approach*) dan pendekatan sistem (*system approach*) merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kedua pendekatan ini harus berjalan secara simultan, sebab aparatur yang baik yang tidak didukung

oleh sebuah sistem dan birokrasi yang baik, akibatnya tidak berjalan secara efektif. Demikian pula sistem yang baik yang tidak didukung oleh aparatur yang baik juga tidak bisa berjalan secara efektif. Sebaliknya, aparatur yang baik didukung sebuah sistem birokrasi yang baik, akan berjalan beriringan dengan baik, dan akan melahirkan budaya kerja yang baik dan sehat. Itulah antara lain makna yang ditunjukkan oleh QS. al-Râ'd [13]:11 di atas dengan terma "*anfusahum*". Perbaikan hanya bisa terwujud secara efektif dengan perpaduan antara kualitas personal dan profesionalitas aparatur didukung oleh sebuah sistem yang baik. Hal ini akan melahirkan perubahan (reformasi) birokrasi yang memperbaiki kondisi bangsa yang ditandai dengan terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial.

Pemberdayaan nilai-nilai agama dipandang sebagai upaya menanamkan nilai-nilai agama yang dianut sebagai instrumen kontrol terhadap prilaku aparatur. Hal itu menunjukkan bahwa nilai-nilai agama merupakan kebutuhan dalam mengatasi berbagai tindak kejahatan manipulatif, fiktif, *mark up, kick back*, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa, paradigma pendidikan dan pemberdayaannya harus menjadi tujuan pendidikan. Pendidikan seharusnya tidak lagi berorientasi kognitif-intelektual semata, tetapi yang lebih urgen adalah internalisasi nilai-nilai luhur kedalam kesadaran individu. Kecerdasan emosional dan spiritual harus mendapat penekanan dan porsi yang maksimal dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan, agar terbentuk peserta didik yang memiliki kecerdasan majemuk (*multiple intelligences*) untuk mencapai pembangunan manusia Indo-

nesia seutuhnya. Kecerdasan yang utuh adalah keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.⁶

Inspektorat Kementerian Agama R.I. menyadari pentingnya pengawasan dengan pendekatan agama (PPA) terhadap aparatur. PPA merupakan alternatif model pengawasan dini yang pendekatannya lebih menekankan pada pembedayaan nilai-nilai agama. Dalam PPA, terjalin hubungan antara manajemen pemerintahan dengan nilai-nilai ketuhanan yang disuarakan dari dalam hati nurani. Pendekatan ini dikembangkan untuk mendorong terbentuknya karakter dan jati diri aparatur negara melalui pemahaman dan internalisasi nilai-nilai agama, agar mampu menjalankan fungsi kontrol diri (*self control*) dalam rangka membangun pemerintahan dan budaya kerja yang baik dan bersih.⁷

PPA juga merupakan upaya mewujudkan kesadaran aparatur tentang arti penting pengawasan diri dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang bersih, bermoral, dan profesional yang dibingkai dengan nilai-nilai spiritual-keagamaan. Pendekatan religius merupakan sebuah pendekatan untuk membangun mental aparatur yang amanah. Dalam rangka mempersiapkan aparatur negara yang amanah, jujur,

⁶ Penulis menyebutnya dengan "tiga h", pertama, *head* (kepala) yaitu kecerdasan intelektual atau kognitif. Kedua, *hand* (tangan) yaitu keterampilan (*skill*), ketiga, *heart* (hati) kecerdasan emosional-spiritual "*hablun min al-nas wa hablun min Allah*" yang meliputi ranah afektif. Ketiganya mencakup ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif.

⁷Tim Penyusun, *Mengembangkan Budaya Kerja Melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama* (Jakarta: Itjen Kementerian Agama RI., 2011),hlm. 3-4.

profesional, dan bertanggung jawab di masa mendatang, maka pendidikan agama secara khusus, dan pendidikan pada umumnya yang terdiri dari perencanaan, proses, dan evaluasinya tidak lagi hanya pada aspek kognitif (teoretis) yang menjadi fokus perhatian, tetapi yang mendesak adalah terbangunnya kesadaran individu peserta didik melalui internalisasi nilai-nilai (afeksi) agamanya.

Pendekatan tersebut harus pula didukung oleh nilai-nilai budaya yang luhur dan sejalan dengan ajaran agama, agar keluhuran tersebut membudaya dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuataannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan pengenalan dan penggalian ulang terhadap nilai-nilai budaya yang utama untuk menopang pembinaan karakter yang utuh dan kuat dalam kepribadian peserta didik menghadapi era dan tantangannya masing-masing kelak.

Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Budaya Lokal

Nilai-nilai kearifan budaya lokal yang dimaksud dalam tulisan ini adalah nilai-nilai kearifan budaya Bugis, yang tentu saja terdapat pada nilai-nilai budaya suku dan etnik lainnya. Kearifan lokal⁸ seringkali menjadi sesuatu yang dirindukan oleh kesadaran masyarakat

⁸Dalam kajian Islam, kearifan lokal lebih dikenal dengan istilah *al-'urf*.*Al-'Urf* merupakan salah satu sumber hukum Islam, yakni menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an dan Sunnah. Nilai-nilai budaya dan tradisi yang sejalan dengan Islam dapat menjadi alat legalitas (hukum). Penggalian terhadap nilai-nilai budaya merupakan anjuran agama, sebab di dalamnya banyak ditemukan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan Islam.

dan pemerintah bahwa dalam menghadapi tantangan demokratisasi dan gelombang globalisasi dibutuhkan penggalian ulang terhadap nilai-nilai dan khazanah lokal yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur tersebut merupakan cerminan budaya dan karakter masyarakat Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan.

Sejak dahulu kala, budaya masyarakat Sulawesi Selatan sudah tercatat di dalam literatur kuno orang Bugis-Makassar dengan istilah "Lontarak". Zaman pra-Islam Sulawesi Selatan yang sampai sekarang dapat diungkapkan melalui sumber-sumber tertulis, barulah dapat diungkapkan sekitar abad XIV M. hingga diterimanya Islam sebagai agama yang dianut oleh masyarakat pada awal abad XVII M. Dalam kurun waktu tersebut, sumber yang melukiskan keadaan masyarakat tersebut hanyalah Lontarak.⁹

Nilai-nilai yang terdapat dalam kebudayaan orang Bugis itu perlu diungkapkan dalam setiap gerak kehidupan orang Bugis dalam menghadapi setiap dinamika kehidupan yang penuh tantangan. Nilai-nilai itu diciptakan karena dimuliakan oleh para leluhur mereka sebagai peletak dasar masyarakat dan kebudayaan Bugis. Selanjutnya, dialihkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dalam upaya mewariskannya, mereka menyampaikan dalam bentuk nasihat atau pesan. Nasihat dan petuah itu terdapat dalam *lontara'-lontara'* yang disebut *pappangaja* dan *paseng*.¹⁰ Kebudayaan

⁹Mattulada, *Sulawesi Selatan Pra Islam* dalam *Bulletin Yaperna* No. 12, tahun III., hlm. 76.

¹⁰A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Yogyakarta: Ombak, 2011), 66. Dikutip dari Prof. Drs. G.H.M. Riekerk "Lahirnya Kedatuan Tomanurung" (ceramah), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang,

Bugis dapat ditelusuri dalam beberapa literatur, misalnya dalam "Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis".¹¹ Kebudayaan orang Bugis mempunyai nilai-nilai utama berupa kejujuran, kecendikiaan, kepatutan, keteguhan, usaha atau kerja keras.

1. Menanamkan nilai *lempu'*

Secara etimologis, *lempu'* berarti "lurus" yang merupakan antonim dari kata 'bengkok'. Penggunaan kata tersebut dalam berbagai konteksnya, berarti juga ikhlas, benar, baik atau adil. Misalnya, *laleng malempu'* artinya jalan yang lurus. Dengan demikian antonim kata-kata tersebut yaitu curang, culas, dusta, khianat, seleweng, buruk, tipu, aninya, dan semacamnya. Kejujuran merupakan sumber amanah, sebab inti amanah itu adalah kejujuran dan tanggung jawab. Intergritas mesti dibangun dalam situasi yang tidak instan, bahkan harus dibangun dari pembiasaan, keteladanan, kontrol, dan pengendalian. Ini merupakan tugas pendidikan yang paling utama dan urgent sepanjang zaman.

2. Merawat *siri'* dengan Kejujuran

Masyarakat Bugis mempunyai nilai budaya *siri'* (malu, harga diri) dan *pesse* (solidaritas). Bagi masyarakat Bugis, *siri'* adalah suatu norma yang sangat dihormati, karena hal itu merupakan bukti bahwa seseorang dapat menjaga kesucian diri dan kehormatannya. Dalam kaitan ini, syair orang Bugis menyebutkan: "*Duwai kuala sappo; unganna panasae, belona kanukue*" ("Dua [hal] yang kujadikan pagar [pelindung diri dan kehormatan], yaitu bunga nangka dan hiasan kuku").¹²

13 Agustus 1969.

¹¹ Rahim, *Nilai-Nilai Utama*, hlm. 37-66.

¹²Dalam tradisi Bugis ada dua norma yang sangat dihormati selain dari norma-norma agama,

Kata ‘panasa’ pada ‘unganna panasae’ yang sinonim dengan kata “lempu”.¹³ Bila diberi tekanan *glottal stop* (‘) pada suku kata terakhir menjadi *lempu*’, maka kata itu berubah maknanya menjadi ‘kejujuran’. Kata “belona kanukue”, digunakan untuk hiasan kuku (*belo kanuku*) yang disebut *pacci*. Kata *pacci*, bila mendapat tambahan bunyi “ng” pada akhir kata *pacci* menjadi *paccing*, maka kata itu berubah arti menjadi tidak ternoda, bersih, dan suci. Dengan demikian, “*Duwai kuala sappo; unganna panasae, belona kanukue*” dapat diartikan “dua yang senantiasa dijadikan pagar, yaitu kesucian dan kejujuran”.¹⁴

yaitu *siri’ dan passe’*. *Siri’* adalah “harga diri”, yaitu suatu unsur yang sangat prinsipil dalam diri bagi orang Bugis. Bagi orang Bugis, *siri’* adalah jiwa mereka, harga diri mereka, dan martabat mereka. Oleh karena itu, untuk menegakkan dan membela *siri’* yang dianggap tercemar atau dicemarkan oleh orang lain, maka orang Bugis akan bersedia mengorbankan apa saja, termasuk jiwanya yang paling berharga demi tegaknya *siri’* dalam kehidupan mereka. Hamid Abdullah, *Manusia Bugis-Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Bugis-Makassar* (Jakarta: Inti Dayu, 1985), hlm. 37. Sementara *passe* adalah rasa solidaritas sesama orang Bugis, yaitu suatu nilai dimana ikut merasakan penderitaan orang lain dengan perasaan haru (empati) yang mendalam terhadap sesama. Christian Pelras, *Manusia Bugis*, Terj. Abdul Rahman Abud dkk., *The Bugis* (Jakarta: Nalar bekerja sama Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2005), hlm. 254. Bandingkan dengan Mursalim, “*Tafsir Bahasa Bugis/Tafsir Al-Qur'an al-Karim* Karya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan; Kajian terhadap Pemikiran-Pemikirannya” *Disertasi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 231-232.

¹³Mattulada, “*Latoa; Suatu Lukisan terhadap Antropologi-Politik Orang Bugis*”, *Disertasi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1975), 13. Lihat pula Mursalim, *Tafsir Bahasa Bugis*, hlm. 232.

¹⁴ Salah satu keunikan bahasa Lontarak adalah dalam satu kata bisa saja memiliki arti yang sangat jauh berbeda dengan arti lainnya demikian juga bacaanya, karena di dalam

Kesucian yang dimaksud dalam hal ini adalah suci dalam hati dan tindakan. Suci dalam hati itu mengandung arti adanya ketulusan hati, kebenangan jiwa, *mind set* positif, tidak iri, dan sebagainya. Sedangkan suci dalam tindakan adalah menjaga hal-hal yang memalukan, baik dalam takaran budaya maupun perspektif agama. Dalam konteks penyelenggaraan kemasyarakatan dan ketatanegaraan “*paccing*” bermakna tidak melakukannya korupsi, sebab korupsi adalah kejahatan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran. Jika kejujuran telah hilang maka *siri’* (harga diri) hilang.

Ketika Tociung, Cendikiawan Luwu, diminta nasihatnya oleh calon raja (datu) Soppeng, La Manussa’ Toakkareng, Tociung menyatakan:

“*Eppa’ gau’na lempu’e: risalaie naddampeng, riparennuangie temmacekko bettuanna risanresi teppab-belleang, temmangoangenngi tenia alona, tennaseng deceng rekko nassamarini pudeceng*”.¹⁵

“Ada empat inti perbuatan jujur: Memaaafkan kesalahan orang lain padanya, jujur dalam menerima amanah, artinya tidak berkhianat, tidak serakah dan tidak mengambil yang bukan haknya, ia tidak

penulisannya tidak memiliki tanda-tanda khusus, misalnya *tasydid* (huruf doble) dan *maddah* (panjang).

¹⁵ Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, hlm. 119-120. Ia mengutip dari Lontarak kepunyaan H. Andi Mappasala. Kali-mat “...*tennaseng deceng rekko nassamarini pudeceng*” ini agaknya rancu. Sesuai dengan artinya “tidak memandang kebaikan kalau hanya untuk dirinya, baginya baru dikatakan kebaikan kalau bisa dinikmati bersama” mestinya bunyinya kurang lebih demikian “...*tennaseng deceng rekko- deceng rialemi, iyapa nariasenng deceng rekko- nassamarini pudeceng*”.

menganggap kebaikan kecuali baik juga bagi orang lain”.

Sejalan dengan pengertian di atas Kajaolaliddong, cendikiawan Bone, menjelaskan kejujuran ketika ditanya oleh Raja Bone mengenai pokok-pokok keilmuan. Apa saksinya atau bukti kejujuran? “Seruan ya Ampone!” Apa yang diserukan ya Kajao? “Adapun yang diserukan ialah:

“Aja’ muala taneng-taneng tania taneng-tanengmu. aja’ muala warang-parang tania warang-parangmu nata-niato mana’mu, aja’to mupassu tedong natania tedongmu, enrengnge annya-rang tania anynyarangmu, aja’to muala aju ripasanre’ natengnia iko pasanre’i, aja’to muala aju riwetta wali netengnia iko mpetta waliwi.”¹⁶

“Jangan mengambil tanaman yang bukan tanamanmu, jangan mengambil barang-barang yang bukan barang-barangmu, bukan juga pusakamu; jangan mengeluarkan kerbau (dari kandangnya) yang bukan kerbaumu, juga kuda yang bukan kudamu, jangan ambil kayu yang disandarkan, bukan engkau yang menyandarkan, jangan juga kayu yang sudah ditetak ujung pangkalnya, yang bukan engkau yang menetaknya.”

Pesan ini menunjukkan komitmen kejujuran, yakni tidak mengambil hak orang lain. Pemerintah tidak mengambil hak rakyat melalui korupsi dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Di dalam petuah Bugis di atas dikatakan, kayu yang sudah dipotong pertanda ada yang punya. Kalau yang tersimpan di pinggir jalan saja dipesankan agar tidak diambil,

apalagi yang jelas dijaga di dalam pagar, berarti jelas tidak boleh diambil karena milik orang lain. Pesan ini diungkapkan dalam bahasa Bugis dengan sangat halus dan mengandung kedalaman makna, yakni komitmen kejujuran. Bagi orang Bugis, kandungan filosofis pesan tersebut merupakan nilai dan harga dirinya.

Kejujuran (*lempu’*) adalah harga dirinya (*siri’*), sehingga jika ia kehilangan kejujuran berarti kehilangan kepercayaan dan pada saat yang sama harga dirinya ikut lenyap. Sebaliknya, jika kejujuran terpelihara dengan baik, maka nilai dan harga diri serta martabat insaninya ikut terpelihara dengan baik pula. Dalam pandangan nilai-nilai utama kebudayaan Bugis, kesesuaian antara kata dan perbuatan disebut “*taro ada taro gau*” (antara kata dan perbuatan sama). “*Ada*” (kata) adalah pegangan, ketika ia diucapkan atau keluar dari mulut maka bukan lagi milik yang mengucapkan, sehingga ia akan menjadi alat ukur orang lain tentang orang yang mengucapkan. Nilai-nilai kejujuran itu mestinya menjadi suatu aspek perencanaan, proses, dan penilaian pendidikan untuk membangun karakter yang kuat dan bermartabat.

3. Membangun integritas dengan *amaccang*

Secara etimologis, *amaccang* berasal dari *acca*. Dalam bahasa Bugis ‘cendikia’ sering diartikan ‘*acca*’, yaitu pandai atau pintar. *Acca* ini lebih kepada makna kecerdasan yang positif, dan tidak sebaliknya. *To acca* adalah orang mempunyai kearifan. *Acca* adalah prilaku baik cara berpikir maupun cara bertindak dapat menjadi pertimbangan yang arif.¹⁷ Jadi, *acca* bukan latar belakang pendidikan formal, melainkan nilai-nilai

¹⁶Ibid., hlm. 120.

¹⁷Ibid., hlm. 126.

kearifan yang menghiasi cara berpikirnya dan bertindaknya. Tidak disebut pula *To Acca* kalau tidak jujur. Kalau ada orang berilmu tetapi tidak jujur, tidak pemaaf, serakah, mengambil yang bukan haknya maka hakikatnya ia tidak pandai (bukan *To Acca*). Sayangnya di Indonesia, pelaku korupsi justru dari kalangan sarjana. Itu berarti, lembaga pendidikan yang pernah ia tempati menimba ilmu telah gagal menjadikannya sebagai cendikiawan, karena tidak memiliki karakter yang baik. Perilaku *To Acca* (cendikiawan) terpancar dari setiap tutur kata yang benar dan santun, prilaku jujur, pemaaf, tidak serakah, dan lain-lain. Kecendikiaan seseorang tidak diukur dari gelar akademik, melainkan dari nilai ucapan dan prilakunya yang terpuji dan penuh kearifan.

Kejujuran dan kecendikiaan adalah nilai utama budaya orang Bugis yang saling berhubungan. Yang dinamakan kecendikiaan (*amaccang*) adalah tidak ada yang sulit dilaksanakan, tidak ada pembicaraan yang sulit disambut, dengan kata-kata yang baik dan lemah-lembut lagi percaya kepada sesama manusia. Yang dinamakan jujur ialah perbuatan baik, pikiran benar, tingkah laku sopan lagi takut kepada Tuhan.¹⁸ Pendidikan yang berhasil membentuk kecendikiaan adalah pendidikan yang mampu menanamkan kepribadian yang santun, prilaku jujur, pemaaf, tidak serakah, senang menolong sesama. Nilai-nilai terpuji seperti ini mestinya menjadi aspek yang dijadikan tolok ukur keberhasilan sebuah proses pendidikan. Kejujuran akan melahirkan karakter yang mandiri, kuar, dan

¹⁸ Machmud, *Silasa*, hlm. 36, butir 31. Bandingkan dengan Waspada Santing dkk., dalam Chairuddin B, *Refleksi 75 Tahun Prof. Dr. Hj. Andi Rasdiyanah; Meneguhkan Eksistensi Alauddin* (Makassar; Pustaka Al-Zikra, 2010), hlm.196-199.

bermartabat, sedangkan kecurangan me-lahirkan karakter yang lemah, curang, dan khianat.

4. Menakar prilaku dengan asas *asitinajang*

Kepatutan, kepentasan, kelayakan dalam bahasa Bugis disebut *asitinajang*. Kata ini berasal dari *tinaja* yang berarti cocok, sesuai, pantas atau patut. Lontarak mengajarkan budaya *sitinaja* dengan mengatakan: "Duduki kedudukanmu, tempati tempatmu."¹⁹ *Ade' Wari* (adat perbedaan) dalam budaya Bugis pada prinsipnya mengatur segala sesuatu agar berada pada tempatnya, termasuk perbuatan *mappasitinaja*. Kewajiban yang dibaktikan dengan memperoleh hak yang sepadan adalah sesuatu perbuatan yang patut, banyak atau sedikit, tidak diper-soalkan dalam konsep *sitinaja*. Hal ini sesuai denganpetuah: "*Alai cedde'e risesena engkai mappideceng, sampeangngi maegai risesena engkai makkasolang*".²⁰ Artinya: "Ambillah yang sedikit jika yang sedikit itu mendatangkan kebaikan, dan tolaklah yang banyak apabila yang banyak itu mendatangkan kebina-saan/kerusakan". Prinsip *asitinajang* adalah *sitinajai resona na appoleangenna*. Artinya, kepatutan adalah cocok atau "sesuainya antara pekerjaannya dengan pendapatannya (hasil yang diperoleh)".

Dalam prinsip budaya orang Bugis—yang menghayati dan mengamalkan budayanya—memperoleh hasil harus sesuai dengan pekerjaannya, sesuai

¹⁹ Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, hlm. 129.

²⁰Ibid., hlm. 130 dikutip dari A. Hasan Machmud, hlm. 76, butir 108. Korupsi, selain tidak pantas (*de' nasitinaja*), ia juga merusak (*makkasolang*), karena itu korupsi bertantangan dengan nilai budaya Bugis dan sangat memalukan.

dengan tanggung jawabnya. Jadi, *asitinajang* bertentangan dengan prilaku korup. Korupsi merupakan jalan pintas yang sangat tidak pantas (haram, ilegal), melanggar aturan, norma, sebab hal itu merugikan rakyat dan negara. Pejabat - negara ataupun swasta - yang memeroleh hasil tidak sesuai dengan kerjanya itu tidak pantas (*de' nasitinaja*). Ukuran kepatutan itu bisa diukur dari aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlaku, atau dalam takaran agama mengenai halal dan haram. Dalam tinjauan Islam, kejujuran adalah implementasi iman dan takwa yang hakiki kepada Allah Swt. Dalam konteks kehidupan bernegara, keimanan dan ketakwaan sesuai dengan sila "Ketuhanan yang Maha Esa" dengan butir-butirnya, dan pasal 29 UUD 1945.

Asas kepatutan itu harus diajarkan dan dilatihkan kepada peserta didik, sehingga mereka tumbuh dalam perilaku yang layak dan wajar dalam takaran agama dan budaya. Kelak ketika dewasa dan mengambil peran dalam suatu lembaga baik lembaga pemerintah maupun swasta, mereka senantiasa mendapatkan dan mengambil hak-haknyasesuai dengan standar kepatutan. Takarannya senantiasa merujuk kepada aturan yang berlaku. Perilaku curang, contek dalam ujian (termasuk UN) merupakan sebuah bentuk kegagalan menanamkan kejujuran yang melahirkan prilaku yang tidak pantas.

5. Berdiridi atas prinsip *agettengeng*

Dalam bahasa Bugis, keteguhan disebut *agettengeng*. Prinsip keteguhan orang Bugis tetap pada asas atau setia pada keyakinan, atau kuat dan tangguh dalam pendirian, erat memegang sesuatu. Seperti halnya nilai kejujuran, nilai kecendikiaan, dan nilai kepatutan, maka

nilai keteguhan (*agettengeng*) ini terikat oleh nilai positif. Dikatakan: "*Eppa gau'na gettengnge: tessalaie janci, tessorosie ulu ada, telluka anu pura teppinra assituruseng, mabbicara naparapi, mabbinru'i tepupi napaja*".²¹ (Empat nilai keteguhan; pertama, tidak mengingkari janji, kedua, tidak menghianati kesepakatan, tidak membatalkan keputusan, ketiga, tidak mengubah keputusan, dan keempat, berbicara dan berbuat, bila bekerja tidak berhenti sebelum rampung). Nilai-nilai ini sudah lama dikenal sebelum datangnya Islam, dan telah diaplikasikan oleh orang Bugis dalam keseharian mereka.

Keteguhan adalah sebuah prinsip keberanian menanggung resiko atas kejujuran, kebenaran, kepantasan, sehingga ia tidak akan mungkin goyah oleh godaan dan praktik transaksi untuk kepentingan semu. Keberanian (*awaranning*) kadang harus menanggung resiko berpisahnya ruh dan jasad (kematian), tetapi itulah harga diri (*siri'*). "lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai" adalah sebuah pribahasa yang sesuai dengan prinsip *siri'* dan *agettengeng*. Kalau menduduki sebuah jabatan, lebih baik kehilangan jabatan daripada menduduki jabatan yang tidak membawa manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Sekali ia menduduki jabatan dan kewenangan, ia harus memberikan nilai manfaat bagi masyarakat secara adil (*temmappa-silaingeng*). Jadi, jabatan tidak menjadi tujuan, melainkan sebagai kesempatan dan amanah untuk berbuat sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi negara dan masyarakat.

Keteguhan dalam memegang prinsip kebenaran dan kebaikan harus

²¹ Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, hlm. 133.

ditanamkan kedalam jiwa peserta didik. Hal ini dimaksudkan agar mereka memiliki mental yang kuat dan prinsip yang teguh dalam menghadapi berbagai tantangan di eranya masing-masing. Gelombang globalisasi seringkali membuat generasi muda kehilangan arah dan pada akhirnya melupakan nilai-nilai budaya lokal dan agamanya. Keteguhan dalam memegang prinsip kebenaran dan kebaikan akan membentuk kepribadian utama, sehingga disegani dan dihormati di mana pun mereka berada.

6. Merawat *siri'* dengan budaya *reso*

Etos kerja ditinjau dari agama dan budaya merupakan kunci meraih kesuksesan. Nilai-nilai etos kerja atau usaha (*reso*) sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai kejujuran (*lempu'*), kecendikiaan (*amaaccang*), kepatutan (*asitinajang*), dan keteguhan (*agettengeng*). Bahkan, usaha dan kerja keras(*reso*) adalah kunci bagi pelaksanaan nilai-nilai *lempu'*, *acca*, *asitinajang*, *getteng*, sebab nilai-nilai ini baru dapat berperan secara tepat guna dan berdaya guna apabila didukung oleh nilai-nilai usaha (*reso*). Dengan sendirinya, nilai usaha ini pun tegak di atas landasan nilai-nilai tersebut.²²

Lontarak mencela orang yang pemalas, tidak ada usahanya, dan hanya menghabiskan waktunya.²³ Nilai-nilai ini seringkali menghiasi kepribadian orang Bugis, sehingga di mana pun mereka

²²Bandingkan dengan Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, hlm. 136.

²³Dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang menghargai orang-orang yang rajin bekerja dengan professional. Bekerja dalam Islam merupakan ibadah. Terdapat sejumlah hadis yang mencela orang malas, dan menghargai orang bekerja sebagai bentuk kesalahan. Bahkan, tangan di atas (pemberi) lebih baik daripada tangan di bawah (meminta dan mengharap pemberian orang lain).

berada, kegigihan dan kerja keras itu senantiasa menghiasi dirinya. Nilai-nilai tersebut merupakan kunci keberhasilan orang Bugis, karena di mana pun bumi dipijak di situ langit dijunjung. Selama berpijak pada nilai-nilai tersebut, serta menjunjung tingginya akan melahirkan kepercayaan masyarakat (*public trust*), sehingga mereka dapat eksis di mana pun berada. Sebaliknya, jika nilai-nilai ini tidak menjadi prinsip dalam hidupnya, maka di mana pun mereka mencari keberhasilan, mereka hanya menemukan kegagalan. Ketidakjujuran hanyalah akan melahirkan ketidakpercayaan (*distrust*) bagi masyarakat, begitu juga halnya kemalasan.

Ada empat hal yang diperintahkan oleh lontarak bagi pengusaha atau peniaga: yaitu *pertama*, kejujuran (*lempu'*), karena dengannya akan menimbulkan kepercayaan; *kedua*, pergaulan (*assisompungeng*), karena pergaulan yang baik akan mengembangkan usaha, *ketiga*, kecendikiaan (*amaaccang*), karena ia akan memperbaiki pengelolaan dan ketatalaksanaan, dan *keempat*, modal, karena inilah yang menggerakkan usaha.²⁴ Usaha (*reso*) merupakan kunci kesuksesan hidup bukan hanya bagi orang Bugis, melainkan bagi semua orang di dunia. Oleh karena itu etos kerja merupakan keharusan universal, ia tidak hanya terbatas pada agama dan budaya tertentu saja.

7. Akibat hilangnya *siri'*

Nilai-nilai utama tersebut dibingkai dengan prinsip yang disebut *siri'* (malu atau harga diri) yang merupakan prinsip utama masyarakat Bugis. *Siri'* pada mulanya mengandung

²⁴ Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, hlm. 137.

makna yang berkonotasi positif, tetapi jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai luhur lainnya ia dapat pula berkonotasi negatif.²⁵ *Siri'* seringkali dimaknai sebagai nilai bagi orang Bugis. Karena itu, jika seseorang melakukan hal-hal yang tidak baik, itu memalukan (*mappakasisri'*). Jika ia melakukan hal-hal yang jelek dan memalukan maka di saat itulah harga diri dan nilai kemanusiaannya turun. Sebaliknya, jika ia melakukan hal positif dan baik, di saat itulah ia menaikkan derajat kemanusiaannya sebagai orang Bugis.

Orang yang telanjang dari perasaan malu (*siri'*) adalah telanjang dari aspek moralitas, dan oleh *lontara'* orang itu diserupakan dengan binatang. Binatang paling buruk adalah binatang yang kerjanya hanya melakukan kerusakan, menjengkelkan, menjijikkan, yakni tikus. Di sawah ia merusak tanaman (disebut hama padi), setelah dipanen dan disimpan di *rakkiang* rumah juga dirusak, selesai ditumbuk menjadi beras, sudah dimasak, tikus terus mempreteli. Nasi yang sudah dimakannya, dikencingi, diberaki, kemudian ia turun ke tanah dan di situ tahi pun dijilatnya, dinding dilobangi, dan kejahanan "kriminal" lainnya.

Jika melakukan yang menyerupai sifat tikus, kerjanya merusak sistem, melanggar aturan, mengacaukan kehidupan, mengumbar aib diri dan orang lain di saat itulah manusia jatuh harga diri dan wibawanya. Jika ia tidak melakukan hal-hal yang mengangkat nilai dan derajat kemanusiaannya, ia bagaikan tikus. Oleh karena itu, nilai *siri'* yang berkonotasi positif harus ditegakkan, sehingga tatanan kehidupan masyarakat menjadi lebih bermartabat dan memberikan nilai-nilai positif bagi kehidupan. *Siri'* sebagai

harga diri, martabat, khususnya bagi masyarakat Bugis, dalam konteks Islam bahkan, *siri'* itu adalah bagian dari iman.

Budaya *siri'* harus diajarkan kepada peserta didik, agar kelak menjadi pribadi yang mempunyai harga diri yang tinggi. Nilai *siri'* akan mendorong mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pekerja keras, dan cerdas sehingga tidak menjadi beban bagi orang lain. Dengan prinsip *reso* (usaha), mereka akan tumbuh menjadi pribadi mandiri dan pantang "menganggur" karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip yang mereka anut. Orang Bugis mempunyai budaya *pasom-pe'* (perantau). Dengan budaya ini orang Bugis memiliki jiwa pekerja keras. Jika ini dipelihara dengan baik, masyarakat Bugis tidak perlu menerima program penyebaran penduduk berupa transmigrasi, karena sejak dulu sudah berani berhijrah melalui budaya *sompe'* (merantau).

Penutup

Nilai-nilai luhur ajaran Islam mengenai integritas dan kejujuran tidak disangskakan lagi sebagai kebenaran universal yang bersumber dari Tuhan, sehingga kejujuran merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) manusia secara keseluruhan tanpa dibatasi oleh latar belakang agama dan kepercayaan, suku, serta budaya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa penanaman nilai-nilai kejujuran merupakan ranah afektif sebagai bagian integral dalam pendidikan yang menjadi kunci membangun karakter dan integritas peserta didik yang kelak memegang amanah publik. Oleh karena itu, pemberian porsi terhadap aspek kognitif-intelektual secara tidak seimbang dengan aspek emosional dan spiritual telah dan akan berdampak buruk bagi penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. Kaum intelektual yang masuk kedalam sistem

²⁵ Ibid., hlm. 139-140.

pemerintahan telah membentuk sistem dan budaya kerja aparatur yang tidak memiliki integritas yang baik. Hal ini dibuktikan dengan perilaku korupsi aparatur negara yang *nota bene* sebagai *out put* lembaga-lembaga pendidikan.

Dalam rangka mengatasi persoalan korupsi, pendidikan harus mampu sejak dini melakukan internalisasi nilai-nilai luhur yang bersumber dari ajaran agama dan nilai-nilai kearifan budaya. Kearifan nilai-nilai budaya lokal sejatinya diperkenalkan dan ditanamkan dalam kesadaran peserta didik, sehingga nilai-nilai luhur itu tetap eksis dan membudaya dalam prilakunya. Hal ini penting, sebab bila tidak, nilai-nilai luhur tersebut akan lenyap dan tenggelam oleh gelombang budaya global yang di antaranya bertentangan dengan karakter dan jati diri bangsa. Kearifan lokal di samping diapresiasi oleh Islam dengan istilah *al-'urf* juga dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global. Dengan integrasi nilai-nilai universal agama dan keluhuran nilai-nilai budaya akan melahirkan pemimpin yang "berkarakter" dan membentuk masyarakat yang "berkarakter" pula menjadi *civil society*.[]

Daftar Pustaka

- Abdullah, Hamid. *Manusia Bugis-Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Bugis-Makassar*. Jakarta: Inti Dayu, 1985.
- Abdullah, Amin. "Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas". *Jurnal Pendidikan Lentera*. Makassar: Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin, 1998.
- Arsyad, Azhar. "Universitas Islam: Integrasi dan Interkoneksi Sains dan Ilmu Agama Menuju Peradaban Islam Universal". *Jurnal Tsaqafah, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Islam*. Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Pondok Modern Darussalam Gontor, Indonesia, Vol. 2. No. 2, 2006.
- Machmud, A Hasan. *Silasa*, 36, butir 31.
- Mattulada. "Latoa; Suatu Lukisan terhadap Antropologi-Politik Orang Bugis". *Disertasi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1975.
- Mattulada. *Sulawesi Selatan Pra Islam dalam Buletin Yaperna*. No. 12, tahun III.
- Mursalim. "Tafsir Bahasa Bugis/Tafsir al-Qur'an al-Karim Karya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan; Kajian terhadap Pemikiran-Pemikirannya". *Disertasi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Pelras, Christian. "Manusia Bugis". Terj. Abdul Rahman Abud dkk. *The Bugis*. Jakarta: Nalar bekerja sama Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2005.
- Pramudya, Wahyu. "Pluralitas Agama: Tantangan Baru bagi Pendidikan Keagamaan di Indonesia". *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan*. Vol. 6, No. 2, Oktober 2005.
- Rahim, A. Rahman. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Riekerk, G.H.M. "Lahirnya Kedatuan Tomanurung". *Kutipan Ceramah*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, 13 Agustus 1969.
- Santing, Waspada, dkk. *Refleksi 75 Tahun Prof. Dr. Hj. Andi Rasdiyanah*;

- Meneguhkan Eksistensi Alauddin.*
Makassar; Pustaka Al-Zikra, 2010.
- Shihab, M. Quraish. "Pendidikan Nilai untuk Pembentukan Sikap dan Prilaku". *Jurnal Pendidikan*. Ujung Pandang: Lentera Fak. Tarbiyah IAIN Alauddin 1997.
- Sultan, Muhammad Sayyid. *Buhuth fi al-Tarbiyah fi al-Tarbiyah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1979.
- Tim Penyusun. *Mengembangkan Budaya Kerja Melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama*. Jakarta: Itjen Kementerian Agama RI., 2011.

